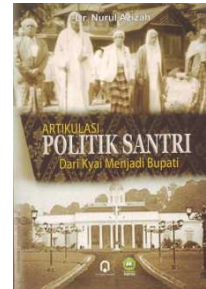


BOOK REVIEW

Judul : Artikulasi Politik Santri dari Kyai
Menjadi Bupati
Penulis : Nurul Azizah
Penerbit : Pustaka Pelajar & STAIN Jember Press
Cetakan : I, Desember 2013
Tebal : x+287



TRANSFORMASI KYAI MENJADI POLITISI DALAM PETA POLITIK INDONESIA

Mohamad Nuryansah

Alumni Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
dan Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang
Email: m_nuryansah@yahoo.com

Buku ini merupakan karya dari Nurul Azizah, seorang dosen dan aktivis perempuan yang lahir di Situbondo Jawa Timur tahun 1974. Studi S1 serta S2 diselesaikannya dari Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo, dan pendidikan S3 berhasil diraih dari Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Aktif mengajar di Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Jember, Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy dan Dosen di beberapa kampus lainnya. Di tengah-tengah kesibukannya, aktivis yang lahir di Situbondo ini tetap meluangkan waktunya untuk mengabdikan diri di berbagai organisasi massa dan organisasi profesi. Buku yang berjudul ‘Artikulasi Politik Santri’ ini adalah adaptasi dari Disertasi pada Program Doktor Ilmu-Ilmu Sosial di Pascasarjana Universitas Airlangga di tahun 2012.

Secara umum, buku yang diterbitkan atas kerjasama antara Pustaka Pelajar dengan STAIN Jember ini membicarakan tentang transformasi peran Kyai semenjak masa reformasi bergulir yang sebelumnya menjadi pemimpin informal (pesantren) mendadak menjadi pemimpin

formal (kepala daerah). Peristiwa ini tidak lepas dari perubahan regulasi selama memasuki gerbang reformasi yang awalnya pemerintah (orde baru) menganut sistem sentralistik berganti menjadi desentralisasi. Buku ini menarik lantaran ditulis oleh seseorang yang betul-betul mengetahui dunia Kyai dan pesantren karena ia pernah ‘nyantri’ dan mengabdikan di salah satu pondok pesantren. Sebagai seorang yang pernah hidup dan dekat dengan Kyai dan dunia pesantren, perempuan kelahiran 1974 ini berhasil membuat analisis yang tajam dan komprehensif.

Buku yang diterbitkan tahun 2013 ini termasuk kategori kajian ilmu politik, dan merupakan karya langka sebab buku yang membahas tentang politik Kyai yang berangkat dari riset lapangan masih jarang ditemukan. Apalagi, riset ini melibatkan dua Bupati-Kyai yang tentunya memiliki kesulitan tingkat tinggi lantaran kesibukan yang mereka jalani sebagai seorang pemimpin daerah. Buku ini memusatkan perhatian pada pergeseran kepemimpinan Kyai di pondok pesantren yang lebih dominan unsur tradisionalnya menuju kepemimpinan rasional-modern dalam sistem birokrasi. Pergeseran peran tersebut tentu mengakibatkan berbagai implikasi logis yang tidak terhindarkan, dan point itulah yang membedakan buku ini dengan buku-buku yang lainnya. Sebut saja misalnya karya dari Zamakhsyari Dhofier yang berjudul “*Tradisi Pesantren*” atau Clifford Geertz dengan judul “*The Javanese Kyai, The Changing Role of Cultural-Broker*” yang lebih fokus pada masalah tradisi pesantren dan hubungan antara Kyai, santri dan masyarakat. Karya ini juga berbeda dengan buku Endang Turmudi “*Perselingkuban Kyai dan Kekuasaan*” dan Ali Maschan Moesa “*Kyai dan Politik Dalam Wacana Civil Society*” yang membicarakan faktor-faktor pembentuk para Kyai memiliki kekuatan politik yang kuat di masyarakat dan juga membicarakan tentang berbagai implikasi saat para Kyai memilih terjun ke dunia politik praktis.

Metode yang dipakai dalam buku ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang berusaha menjelaskan atau

mengungkap fenomena atau makna pengalaman Kyai yang menjadi kepala daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena akan memberi peluang melakukan interpretasi agar mendapatkan pemahaman yang holistik mengenai pergeseran kepemimpinan Kyai yang tradisonal menjadi kepemimpinan rasional. Penelitian buku ini dilakukan di Kabupaten Sumenep dan Pamekasan, karena dua kabupaten tersebut dipimpin oleh Bupati yang berasal dari kalangan Kyai pesantren. Pemilihan Bupati Kabupaten Sumenep dan Pamekasan tidak dilakukan untuk mengkomparasikan keduanya, melainkan untuk memperkaya data penelitian.

Dalam buku setebal 287 ini, diawali dengan pembahasan sosok Kyai, di mana Kyai di buku ini disebut sebagai elit yang mempunyai pengaruh dan kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Terdapat semacam keyakinan kuat yang didasari doktrin keagamaan bahwa para Kyai merupakan pewaris para Nabi (*Warasatul anbiya*), tidak mengherankan jika para Kyai menjadi sumber referensi masyarakat santri dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam permasalahan politik. Apalagi, secara historis keterlibatan para Kyai atau Ulama' di tanah Jawa dalam dunia politik telah terlihat sejak zaman sebelum sampai berdirinya Kerajaan Demak. Setelah itu berlanjut pada masa revolusi saat para Kyai berjuang melawan pemerintah kolonial Belanda (penjajah). Kemudian ketika menjelang maupun setelah kemerdekaan, peran gerakan politik para Kyai terlihat cukup menonjol. Di masa reformasi, keterlibatan para Kyai dalam dunia politik semakin intens, terlebih saat dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang berisi pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Perubahan sistem ini tentu membuka kesempatan kepada tokoh atau elit lokal tidak tekecuali para Kyai untuk terlibat secara aktif dalam masalah politik lokal.

Di bagian ke dua, buku ini menjelaskan tentang hubungan Kyai-santri yang mempunyai relasi ketaatan yang sangat kuat dengan dilandasi sikap *tawadhu'* dengan kekainan untuk mendapatkan

barokah doa dari Sang Kyai. Ketaatan santri terhadap Kyai diwujudkan dalam sikap hormat dan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Kyainya. Dengan potensi jumlah santri dan alumni yang besar, para Kyai kerap kali menjadi sasaran partai politik atau para politisi untuk membangun kekuatan politik. Tidak mengherankan pula bila setiap hajatan pemilihan umum para Kyai atau suara Kyai selalu diperebutkan oleh partai-partai politik. Sebenarnya, banyak para pengamat melihat kiprah para Kyai dalam dunia politik dinilai blunder, hal ini didasarkan dari wawasan tentang dunia politik, birokrasi dan pemerintahan yang masih lemah, sehingga para Kyai dianggap belum siap berkecimpung dunia politik. Keterlibatan para Kyai dalam dunia politik juga memungkinkan terjadinya persaingan antar-Kyai yang memiliki perbedaan sikap politik. Sikap ini jelas berpotensi akan membingungkan masyarakat yang tidak jarang sampai menimbulkan konflik, perpecahan atau perseteruan antar-pendukung masing-masing Kyai. Meskipun demikian, sebagian Kyai tetap tidak 'kapok' untuk terjun dalam dunia politik, mereka tidak mempedulikan fakta-fakta tersebut disebabkan syahwat politik yang terlampau besar.

Di bagian ke tiga, tulisan ini mencoba mendudukan dinamika politik lokal pasca lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan. Sisi yang paling menonjol adalah orientasi politik dari sentralistik menuju desentralisasi kekuasaan. Dampaknya, banyak bermunculan tokoh-tokoh lokal yang menjadi pemimpin atau kepala daerah, salah satunya para Kyai. Secara politik, tentu tidak ada aturan yang melarang keikutsertaan para Kyai terjun dalam dunia politik, hanya saja sudah siapkah mereka berkompetisi dan mengemban tanggungjawab yang cukup berat itu. Mengingat, di beberapa daerah menunjukkan gejala yang kurang menggembirakan mengenai kepemimpinan lokal/daerah, alasannya banyak yang terkena kasus korupsi, kolusi, nepotisme, asusila, dan ketidakmampuan mengurus birokrasi serta pemerintahan (*ambradul*). Ketidaksiapan itu tidak jarang menjadi ajang kekerasan karena prinsip yang diyakini hanya siap menang tetapi tidak siap kalah, sehingga efeknya justru menjadi perpecahan di kalangan masyarakat di

tingkat bawah. Meskipun demikian, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung juga memiliki manfaat yang besar sebab menjadikan rakyat memiliki kebebasan dalam memilih pemimpin-pemimpin mereka. Manfaat berikutnya adalah adanya *power sharing* yang memungkinkan daerah dapat mengelola pendapatan atau potensi daerahnya masing-masing secara mandiri.

Di bagian ke empat, buku ini membahas tipe-tipe kepemimpinan yang diambil dari teori Max Webber, tipe pertama kepemimpinan kharisma, yaitu suatu kualitas diri yang tidak terlihat dari luar akan tetapi auranya terasa pada orang-orang yang dipimpinnya, kekuatan inilah yang mampu menggerakkan pengikutnya. Kedua, tipe kepemimpinan tradisonal, yaitu semua perintah sebisa mungkin dapat dipenuhi karena adanya rasa hormat terhadap pola-pola tatanan lama yang sudah mapan. Ketiga, tipe kepemimpinan rasional, yaitu kepatuhan dan kesediaan yang muncul lebih didasarkan pada prinsip-prinsip dan cara-cara rasional, bukan kharisma pemimpin atau adat kebiasaan yang menjadi dasar ketaatan, namun hukum yang dibentuk secara tertulis dan berdasarkan pertimbangan rasional. Kategori yang ketiga ini berciri formal-rasional yang menandai organisasi modern¹. Menariknya, pada masa reformasi seperti sekarang ini para Kyai mampu masuk dan mampu menjalani ketiga tipe kepemimpinan di atas secara bersamaan, yaitu masuk dalam ranah kepemimpinan kharisma, tradisional dan rasional.

Di bagian ke lima, buku ini menunjukkan hasil temuan lapangan untuk mematahkan prediksi para pengamat yang senantiasa mengkhawatirkan keberadaan para Kyai menjadi kepala daerah. Para pengamat merasa memimpin pesantren (dominasi kepemimpinan kharisma & tradisional) dengan memimpin daerah (rasional) jauh sangat berbeda. Alasannya, kepemimpinan yang terdapat dalam pesantren lebih bersifat tradisonal-konservatif yang menjadikan Kyai sebagai pusat segalanya. Gaya semacam inilah yang ditakutkan akan

¹ Nurul Azizah, *Artikulasi Politik Santri*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & STAIN Jember, cet. i, 2013), hlm. 76.

tertransfer bila para Kyai terpilih menjadi seorang kepala daerah. Bagan perbedaan kepemimpinan di pesantren dengan kepemimpinan formal (kepala daerah) dapat dilihat di bawah ini²:

| No | Kajian | Pesantren | Birokrasi |
|----|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | Manajemen | Sentralistik | Manajemen modern |
| 2 | Pemikiran | Tradisonal/magis | Rasional |
| 3 | Kepemimpinan | Berdasarkan nasab | Pemilu |
| 4 | Kekuasaan | Seluruh sektor | Pemerintahan daerah |
| 5 | Pengambilan keputusan | Tunggal/hak veto | Kolektif-kolegial |
| 6 | Fungsi dan peran | Pembuat aturan | Menjalankan aturan |
| 7 | Acara | Situasional/kekeluargaan | Protokoler |
| 8 | Sumber keputusan | Hasil istikharah | Rapat dan sidang |

Terlepas dari hal di atas, berdasarkan hasil penelitian kepada Bupati Sumenep dan Bupati Pamekasan menunjukkan logika seperti itu tidak selamanya benar, karena perpindahan dari dunia pesantren ke dunia kepemimpinan formal (kepala daerah) nyatanya tidak jauh berbeda. Kenyataannya, para narasumber penelitian ini merasa bahwa pengalaman manajemen pondok pesantren rupanya cukup membantu untuk melakukan rasionalisasi yang sama dalam praktik birokrasi, meskipun sedikit perlu melakukan penyesuaian atau penyelarasan, tetapi hakikatnya tidak ada problem yang sampai menghambat jalannya pemerintahan. Artinya, kepemimpinan di pesantren maupun kepemimpinan politik bukanlah dua hal yang terpisah sebab keduanya ditemukan kesamaan-kesamaan yang cukup signifikan untuk menjelaskan proses adaptasi itu sendiri.

Di bagian ke enam, buku ini mencoba menjelaskan efek dari sentuhan para Kyai selama tampil sebagai seorang politisi. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa saat kebebasan berdemokrasi di masa

² Nurul Azizah, *Artikulasi...*, hlm. 175.

reformasi bergulir sebagian Kyai masuk dan terlibat secara aktif di politik. Mereka merasa berkewajiban untuk menata dan memperbaiki tatanan bangsa yang sedang terpuruk saat itu. Peran baru itu dibarengi dengan kelahiran partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai yang dibidani oleh NU dan dideklarasikan para Kyai atas dasar aspirasi warga nahdliyin mengawali kiprah para Kyai untuk kembali di panggung politik, setelah sekian lama jaga jarak dengan partai politik sebagai bentuk khittah NU 1926 dan isolasi politik (akibat perlakuan diskriminatif) dari rezim orde baru. Lebih dari itu, keberadaan partai baru tersebut semakin membuat syahwat politik para Kyai semakin tidak terkendali. Bahkan, setelah munculnya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, para Kyai sibuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai kepala daerah.

Pada situasi seorang Kyai dituntut untuk dapat memobilisasi masa sebagai konsekuensi mencalonkan dan dicalonkan sebagai kepala daerah, hasil temuan di lapangan sering memperlihatkan bahwa ritual-ritual keagamaan yang seharusnya sebagai fungsi religius dibelokkan menjadi fungsi pragmatis untuk tujuan politik. Penggunaan fungsi keagamaan seperti istighosah sebagai salah satu instrument kemenangan juga sering dipakai untuk konsolidasi politik, kampanye politik dan kepentingan-kepentingan politik lain. Alhasil, kampanye politik yang seharusnya menyampaikan visi misi dan program partai politik untuk mengatur sebuah Negara atau wilayah secara demokratis berubah menjadi pengajian yang sakral dan dogmatis yang memaksa audien atas nama Tuhan untuk mematuhi fatwa politik tersebut.

Di bagian ke tujuh, buku ini mencoba membedah gaya kepemimpinan Kyai selama menjadi kepala daerah. Saat para Kyai masuk kancah politik baik sebagai pendukung atau pun kontestan kepala daerah, mereka dihadapkan pada persoalan politik transaksional guna membangun koalisi. Hukum koalisi yang menuntut adanya permintaan dan penawaran yang harus disepakati membawa para Bupati Kyai mengikuti ritme tersebut. Hasil temuan di Sumenep dan Pamekasan menunjukkan demikian, pemberian posisi-posisi

strategis lebih banyak diberikan kepada kawan dalam satu kapal koalisi sebagai balas jasa atas keringat yang telah dikeluarkan untuk suksesi kepemimpinan. Menariknya lagi, hasil riset juga menunjukkan bahwa para Kyai yang terpilih sebagai bupati di Sumenep dan Pamekasan memberikan syarat-syarat kesamaan asal pesantren sebagai pertimbangan utama dalam mengangkat staf-staf dan pos-pos struktural lainnya.

Langkah tersebut diambil karena cara itu dianggap dapat memudahkan konsolidasi dan koordinasi sebagai salah satu bagian dari strategi untuk menciptakan lingkungan politik yang mudah dikendalikan oleh Sang Bupati-Kyai. Di sisi lain, model seperti itu tentunya dapat merusak sikap profesionalisme dalam menjalankan roda pemerintahan. Efeknya, kontrol dalam pemerintahan menjadi lemah, sehingga kinerja pemerintah beresiko kurang maksimal. Alhasil, ekspektasi masyarakat yang awalnya sangat tinggi terhadap kepemimpinan Kyai sebagai kepala daerah untuk dapat merubah keadaan ke arah perbaikan pada akhirnya dapat menimbulkan kekecewaan.

Di bagian ke delapan, buku ini menemukan pengalaman menarik yang ditunjukkan Bupati Sumenep dan Pamekasan yang tetap menjalankan peran dan fungsi sebagai Kyai sekalipun ia telah menjadi seorang birokrat, seperti tetap mengisi pengajian kitab kuning di pondok pesantrennya, tetap menerima permintaan mengisi pengajian di masyarakat, dan sering menunjukkan atribut ke-kyai-an saat bertugas sebagai Bupati. Langkah semacam ini jelas mencoba meleburkan nuansa religius di dalam bingkai politik-birokrat. Pola ke-kyai-an yang terus dilestarikan selama menjadi kepala daerah membuat masyarakat kehilangan sikap kritisnya, sehingga yang ada adalah sikap pemakluman, respek, hormat dan tawadhu' sebagai bentuk kepatuhan pada doktrin-doktrin keagamaan yang sering disampaikan oleh Bupati-Kyai dalam berbagai kesempatan.

Sekalipun tema yang disajikan menarik, buku ini masih memiliki beberapa catatan, seperti data dari subjek penelitian yaitu Bupati

Sumenep dan Pamekasan terlihat sangat sedikit. Data yang muncul lebih banyak dari orang-orang di sekeliling Sang Bupati atau pun dari hasil observasi, sehingga hal ini membuat ketidakseimbangan data. Padahal akan lebih menarik bila penggalian data difokuskan pada kedua subjek penelitiannya, yaitu Bupati-Kyai di Sumenep dan Pamekasan, sehingga data dari keduanya menjadi kaya yang berefek pada kedalaman analisis. *Kedua*, ulasan metode penelitian terlihat belum aplikatif untuk menjelaskan kerja penelitian, karena lebih banyak membahas definisi atau maksud-maksud dari aspek metodologinya. Idealnya, pembahasan metode penelitian dapat menampilkan atau menunjukkan definisi operasional penelitian. Ketika itu muncul dalam pembahasan maka pembaca dapat disugahi alur informasi penelitian secara utuh, sekaligus juga dapat memberikan pengetahuan penelitian bagi pembaca. *Ketiga*, gaya penulisan yang beberapa kali masih ditemukan rancu, dan ini permasalahan dasar yang mestinya diperhatikan dengan seksama. Alangkah menariknya, bila sebelum terbit dapat dikoreksi terlebih dahulu mengingat buku ini akan dikonsumsi khalayak luas sehingga dapat menjadi sebuah pembelajaran panduan penulisan bagi pembaca.

Terlepas dari segala kelemahan yang ada, buku ini patut mendapatkan penghargaan atau apresiasi yang tinggi, mengingat buku-buku yang mengangkat tema tentang politik Kyai dan santri yang berangkat dari hasil riset lapangan belum banyak ditemukan, sehingga karya ini dapat menjadi jalan bagi peneliti atau penulis lain untuk mengembangkannya lagi. Keunggulan lain dari buku ini adalah memberikan pencerahan dan pengalaman empiris kepada kelompok santri terutama para Kyai politik untuk dapat mempersiapkan kapabilitas dan kualitas personal sebelum memutuskan terjun ke dunia politik. Belajar dari kasus di Sumenep dan Pamekasan yang menjadi objek penelitian buku ini yaitu pentingnya penguasaan masalah dunia politik, birokrasi dan pemerintahan bagi para Kyai atau santri. Tujuannya, supaya para Kyai dan santri tidak hanya menjadi korban

politik yang hanya dimanfaatkan saat moment-moment pemilu semata.

Sebagai penutup, buku ini layak dibaca oleh semua kalangan, termasuk para Dosen, para mahasiswa, pengamat politik, pengamat sosial dan aktivis partai guna mendapatkan perspektif yang berbeda mengenai dunia politik khususnya politik Kyai dan santri. **Selamat membaca.**